LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2025

KECAMATAN PADAKEMBANG

KABUPATEN TASIKMALAYA

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan khadirat Alloh SWT, karena atas Rahmat, hidayah dan anugrah-Nya, Kecamatan Padakembang dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) tahun 2025.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salahsatu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemeintah yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Padakembang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur Tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksnaan program dan kegiatan kecamatan Padakembang salama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksnaan Pembangunan di wilayah Kecamatan Padakembang serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat dilingkungan Kecamatan Padakembang untuk mendukung pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Govermance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Tasikmalaya.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang tahun anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada, oleh karena itu diharapkan adanya masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang Tahun 2025 ini disusun agar dapat dipergunakan sebagai evaluasi dan untuk pengembangan Kecamatan Padakembang lebih lanjut.

Padakembang, Januari 2026

CAMAT PADAKEMBANG

DADAN HAMDANI, SKM .M.Si

Pembina TK 1

NIP : 19710129 198912 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I PENDAHULUAN		
	I. LATAR BELAKANG.....	1
	II. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
	III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
	IV. ISU STRATEGIS.....	9
	V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA		
	I. TUJUAN DAN SASARAN.....	11
	II. PERJANJIAN KINERJA.....	12
	III. RENCANA KINERJA KECAMATAN PADAKEMBANG TAHUN 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
	I. CAPAIAN KINERJA.....	15
	II. REALISASI ANGGARAN.....	20
BAB IV PENUTUP		25

BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban

pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perangkat Daerah Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin oleh Camat sebagai Kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian Kewenangan Bupati di Wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025, yang merupakan bentuk perwujudan untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan Camat pada Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi

pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang

III. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenali struktur organisasi kecamatan secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 seperti gambar di bawah ini :

Gambar 1

Struktur Organisasi

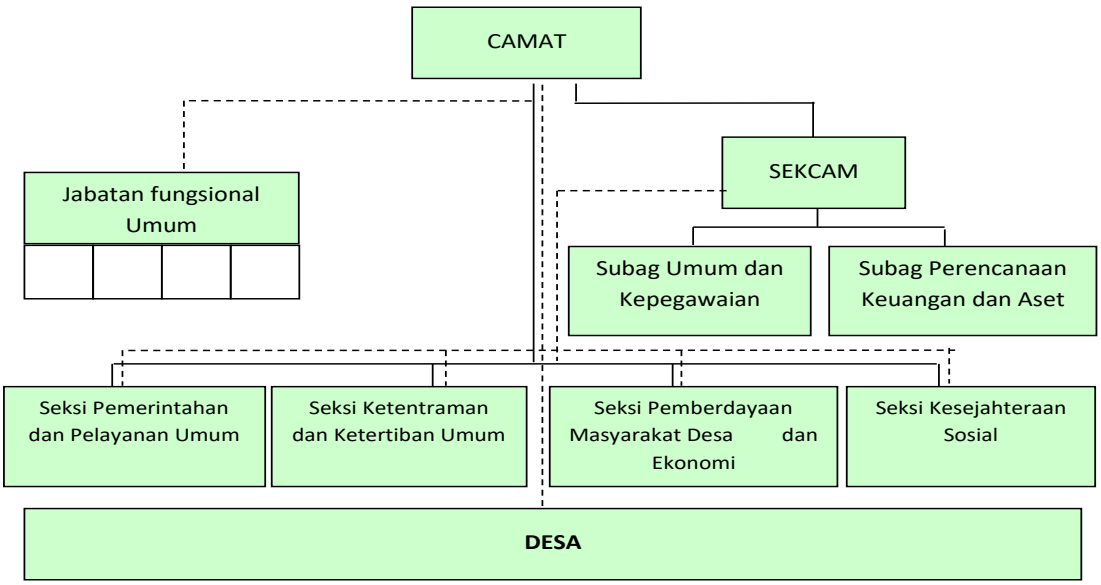

Aspek Kepegawaian

Aspek Kepegawian pada Kantor Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan, terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi Dan Pembangunan
e. Seksi Kesejahteraan Sosial
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab terhadap Camat. Seksi masing-masing dipimpin Kepala Seksi dan bertanggung jawab terhadap Camat. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab pada Sekretaris Kecamatan. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Padakembang sebanyak 13 (Tigabelas) Orang dengan kedudukan sebagaiman pada tabel dibawah ini.

Komposisi Pegawai Kecamatan Padakembang
Menurut Kedudukan dalam Struktur Organisasi dan Jenis Kelamin

No	Nama	Laki-laki	Perem-puan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1	-	1
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4.	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	3	3
5.	Seksi Pemerintahan	1	1	1

6.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan	2		2
7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1
8.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
9.	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
JUMLAH		**7**	**6**	**13**

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Padakembang yang berjumlah 13 orang, 10 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebanyak 3orang berstatus sebagai PPPK Paruh Waktu Secara lengkap tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Padakembang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Struktur Kepegawaian Kecamatan Padakembang berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	4
4	Eselon IV.b	2
5	Fungsional Umum	0
	JUMLAH	**8**

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Padakembang yang berjumlah 13 orang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Personil Kecamatan Padakembang berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Magister (S-2)	4
2.	Sarjana (S-1/D IV)	7
3.	Sarjana Muda (D3)	-
4.	D2	-
5.	D1	-
6.	SLTA / Sederajat	2
7.	SLTP / Sederajat	-
8.	SD / Sederajat	-
	JUMLAH	**13**

Dengan dukungan 13 orang personil yang ada pada Kecamatan Padakembang dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 4 Orang, Sarjana 7 orang, SLTA sebanyak 2 orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang kurang memadai dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

Personil Kecamatan Padakembang
berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Camat	1				1
2.	Sekretaris Kecamatan	1				1
3.	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum		1			1
4.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ekonomi	1	1			2
5.	Seksi Kesejahteraan Sosial	1				1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		1			1

7.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1			1
8.	Su Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1			2
9.	Pelaksana					
Jumlah		**5**	**5**			**10**

Aspek Sarana Prasarana

No	Nama Barang/Sarana/ Prasarana	Kategori (Sarana/ Prasarana)	Jumlah	Satuan	Kondisi (Baik/RR/RB)*	Tahun Perolehan	Lokasi Penempatan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	Laptop	Sarana	2	Unit	Baik	2024	Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
7	Printer	Sarana	2	Unit	Baik/RB	2019/2020	Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
8	Faximile	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	
9	Scaner	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
10	Camera	Sarana	1	Unit	Baik	2019	Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
11	Wireles	Sarana	1	Unit	RB	2007	Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
12	Filling Kabinet	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
13	Genset	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	
14	Meja Tulis	Sarana	8/5	Unit	Baik/RR		Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
15	Meja Rapat	Sarana	1	Unit	RR		Kecamatan Padakembang	
16	Kursi Rapat/Lipat	Sarana	14	Unit	RR		Kecamatan Padakembang	
17	Kursi Putar	Sarana	1	Unit	Baik	2020	Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
18	Proyektor	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	
19	Meja Pelayanan	Sarana	1	Unit	Baik		Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif
20	Rak Arsip	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	
21	CCTV	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	
22	Finger Print	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	
23	TV	Sarana	1	Unit	RB		Kecamatan Padakembang	
24	Kursi Tunggu Pelayanan	Sarana	4	Unit	Baik	2020	Kecamatan Padakembang	Digunakan aktif

Sumber : Data Olahan Subbag Umum Kepegawaian Kecamatan Padakembang 2025

IV. ISU STRATEGIS

Selama kurun waktu 5 (lima) tahu ini, Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan comprehensive sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu – isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Padakembang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Padakembang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Padakembang adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;

   Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat

mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima perlu ditingkatkan.

2. Kurangnya Sumber daya Masyarakat di Kantor Kecamatan Padakembang, sehubungan terdapat beberapa personil purnabakti, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan SDM.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan; Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencangkup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :
   - Membangun sistem pelayanan prima yang mudah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
   - Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
   - Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
   - Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

V. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun kerja yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Juga pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah tercapai yang berhubungan dengan capaian dari program dan kegiatan Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organsasi untuk meningkatnya kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026 merupakan rangkaian kata yang didalamnya terdapat impian yang harus dicapai dalam masa jabatan lima tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada. Dengan demikian ditetapkanlah tujuan dan sasaran Kecamatan Padakembang adalah sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PEMERINTAH KECAMATAN PADAKEMBANG

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di kecamatan padakembang	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Padakembang	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	81,00	81,15	81,20	81,34	81,50	82,00
		Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase peningkatan Status Desa	N/A	N/A	15%	16%	17%	18%
		Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Padakembang 2021-2026

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinana instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah Perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Padakembang Tahun 2025 :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KECAMATAN PADAKEMBANG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Padakembang		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	63 (CC)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Padakembang		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang	82,30
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang	1	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		2	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%
		3	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%

3. PERENCANAAN KINERJA KECAMATAN PADAKEMBANG

Rencana Kinerja Kecamatan Padakembang Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	*2*		*3*	*4*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.717.729.165	Kantor Kecamatan Padakembang
	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.329.000	Kantor Kecamatan Padakembang
	3.	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	62.800.000	Kantor Kecamatan Padakembang
	4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.000.000	Kantor Kecamatan Padakembang
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.025 000	Kantor Kecamatan Padakembang
	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12.025.000	Kantor Kecamatan Padakembang
	3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	14.125.000	Kantor Kecamatan Padakembang
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	135.250.000	Kantor Kecamatan Padakembang
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	Kantor Kecamatan Padakembang
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	24.500.000	Kantor Kecamatan Padakembang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Akuntbilitas kinerja Kantor Kecamatan Padakembang adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Padakembang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Kinerja Kantor Kecamatan Padakembang tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Padakembang

Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	capaian	kriteria
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*
1.	Meningkat-nya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Padakembang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang	63 (CC)	62.8	99,68	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Padakembang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	82,60	101,3%	Sangat tinggi
3.	Meningakatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Padakembang	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	capaian	kriteria
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*
		Persentase potensi dan kejadian konplik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat tinggi
		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	Sangat tinggi

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Padakembang Tahun 2025

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi.

Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 setelah direviu adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Padakembang**	**Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang**

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Padakembang pada tahun 2024 adalah sebesar 62,80 point dengan capaian dibandingkan target adalah 99,68% termasuk dalam kategori CUKUP

Capaian 2025

99,68%

Target : 63

Realisasi : 62,8

Perbandingan tahun sebelumnya

2024	2025
55,02 (CC)	62.80 (B)

Perbandingan dengan Target Renstra

2025	Target Renstra
62.80 (B)	63 (B)

Perbandingan dengan Standar Nasional

2025	Standar Nasional
62,80(B)	69,46 (BB)

Pada aspek sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Padakembang, capaiannya Cukup tinggi yaitu 99,68%. Jika dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya nilai ini naik secara signifikan, karena nilai tahun sebelumnya sebesar 85,5%.

Jika dibandingkan dengan target di akhir renstra capaiannya masih dibawah target, yang seharusnya di kategori B (BAIK) saat ini masih di kategori Cukup (BB).

Faktor-Faktor yang mendukung terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Padakembang adalah terpenuhinya seluruh tahapan sistem mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, penilaian dan evaluasi. Namun pada tahun 2025 masih ada tahapan yang tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga target tidak tercapai.

16

Sasaran 2 **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Padakembang**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang minimal baik**

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Padakembang pada tahun 2025 adalah 82,66 dengan kriteria Baik.

Capaian 2025

101,3 %

Target : Baik

Realisasi : sangat Baik

Perbandingan tahun sebelumnya

2024	2025
81,20 (Baik)	82,60 (Baik)

Perbandingan dengan Target Renstra

2025	Target Renstra
Baik	Baik

Perbandingan dengan Standar Nasional

2025	Standar Nasional
Baik	Baik

Penilaian kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Padakembang didapat dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan pada akhir tahun, Survey ini mencakup Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Kecepatan Pelayanan, Kesesuaian/Kewajaran biaya, Kesesuaian Pelayanan, Kompetensi Petugas, Prilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan dan Kualitas Sarana dan Prasarana.

Pada tahun 2025, capaian di Kecamatan Padakembang adalah 100% yang berarti telah mencapai target baik target di tahun 2025 dan target di akhir Renstra maupun Target Nasional (minimal 76,61).

Adapun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian IKM tahun 2024 terjadi peningkatan. Dari 81,02 point di tahun 2024 menjadi 82,60 point di tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian target untuk sasaran ini didukung oleh peran seluruh pegawai dalam memberi pelayanan yang optimal dan sesuai ketentuan.

Sasaran 3 **Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang**	**Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti** **Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani** **Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan**

Untuk sasaran 3 aspek Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Padakembang terdiri dari tiga indikator kinerja diantaranya Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti, Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani dan Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan

Indikator 1 : Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Capaian 2025

100 %

Target : 100%

Realisasi : 100%

Perbandingan tahun sebelumnya

2023	2024	2025
100%	100%	100%

Perbandingan dengan Target Renstra

2025	Target Renstra
100%	100%

Perbandingan dengan Standar Nasional

2025	Standar Nasional
100%	-

Untuk capaian Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah 100%, capaian ini telah mencapai target yang sudah dientukan baik target tahunan maupun target pada Renstra. Realisasi tersebut dapat dicapai berkat adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektor di Kecamatan Padakembang pada tahun 2025 serta adanya respon cepat dari instansi terkait.

Indikator 2 : Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani

Capaian 2025

100 %

Target : 100%

Realisasi : 100%

Perbandingan tahun sebelumnya

2023	2024	2025
100%	100%	100%

Perbandingan dengan Target Renstra

2025	Target Renstra
100%	100%

Perbandingan dengan Standar Nasional

2025	Standar Nasional
100%	-

Untuk capaian Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani pada tahun 2024 adalah 100%, capaian ini telah mencapai target yang sudah ditentukan baik target tahunan maupun target pada Renstra. Realisasi tersebut dapat dicapai berkat adanya koordinasi dan kerjasama lintas sektor di Kecamatan Padakembang pada tahun 2025 serta adanya respon cepat dari instansi terkait.

Indikator 3 : Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang - undangan.

Capaian 2024

100 %

Target : 100%

Realisasi : 100%

Perbandingan tahun sebelumnya

2023	2024	2025
100%	100%	100%

Perbandingan dengan Target Renstra

2025	Target Renstra
100%	100%

Perbandingan dengan Standar Nasional

2025	Standar Nasional
100%	-

Kecamatan Padakembang terdiri dari 5 desa, berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2025, semua desa telah melaksanakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan ini berkat adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan Padakembang dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan mengenai Desa Tertib Administrasi.

2. Realisasi Anggaran.

Untuk melihat realisasi penyerapan anggaran di Kecamatan Padakembang pada tahun 2024, dapat dilihat pada table dibawah ini : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Periode 01 Januari s.d 31 Desember 2025

PROGRAM	URAIAN	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.717.729.165**	**1.534.094.494**	**91,38**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**1.717.729.165**	**1.534.094.494**	**91,38**
	Belanja Gaji Pokok PNS	760.927.590	667.255.100	93,46
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	71.201.849	59.977.124	87,45
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	77.243.350	72.870.000	90,79
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.549.088	8.485.000	78,14
	Belanja Tunjangan Beras PNS	39.296.866	32.733.840	79,43
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.541.994	2.383.874	27,33
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.009.669	8.168	0,96
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	54.959.450	46.242.972	81,76
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.576.758	1.361.588	26,20
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.730.286	4.084.817	45,84
	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.284.916	0	0,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	686.407.349	638.692.011	93,04
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**60.441.000**	**60.441.000**	**100,00**

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**34.245.500**	**34.245.500**	**100,00**
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.942.500	5.942.500	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.850.000	6.850.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	6.543.000	6.543.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.160.000	2.160.000	100,00
	Belanja alat/ bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan Dinas	3.000.000	3.000.000	100,00
	Belanja Makanan dan minuman rapat	9.750.000	9.750.000	100,00
	Belanja Modal peralatan Personal Computer	6.888.000	6.888.000	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**6.495.000**	**6.495.000**	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	**6.495.000**	**6.495.000**	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**3.750.000**	**3.750.000**	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	**3.750.000**	**3.750.000**	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**15.950 .000**	**15.950 .000**	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	**15.950 .000**	**15.950 .000**	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**62.800.000**	**53.554.716**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**18.000.000**	**9.454.716**	
	Belanja Tagihan Listrik	7.500.000	2.960.716	

	Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/TV Berlangganan	10.500.000	6.494.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**44.800.000**	**44.100.000**	90,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	28.000.000	28.000.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	16.800.000	16.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**66.000.000**	**62.386.500**	97,34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	**52.000.000**	**48.461.500**	95,70
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.427.000	8.427.000	100,00
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	5.500.000	1.961.500	28,33
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.073.000	38.073.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**14.000.000**	**13.925.000**	100,00
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.850.000	7.850.000	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.1500.000	6.150.000	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**22.025.000**	**21.950.000**	99,49
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	**22.025.000**	**21.950.000**	99,49

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.754.000	1.754.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	815.000	815.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer	2.181.000	2.181.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.300.000	14.300.000	100,00
	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	2.975.000	2.900.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**12.025.000**	**11.950.000**	100,00
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	**15.000.000**	**15.000.000**	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.268.000	1.268.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	555.000	555.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000	6.500.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	727.000	727.000	100,00
	Perjalanan Dinas dalam Kota	2.975.000	2.900.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**34.125.000**	**25.717.000**	100,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**34.125.000**	**25.717.000**	100,00

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.154.000	2.154.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	689.000	689.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan komputer	727.000	727.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000	7.800.000	100,00
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan	3.700.000	3.700.000	100.00
	Belanja Jasa tim Administrasi	18.980.000	10.572.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.775.000	3.775.000	100,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**135.250.000**	**134.851.600**	98,08
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	**135.250.000**	**134.851.600**	98,08
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	**135.250.000**	**134.851.600**	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.244.000	3.244.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-kertasdan cover	734.000	734.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan computer	727.000	727.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	250.000	250.000	100,00
	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	87.675.000	87.381.800	98,79

	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.620.000	30.620.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.000.000	12.000.000	54,55
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25.000.000**	**25.000.000**	100,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**25.000.000**	**25.000.000**	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.799.000	1.799.000	100,00
	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover	574.000	574.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan computer	727.000	727.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	10.200.000	10.200.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.7000.000	11.700.000	100,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**24.500.000**	**24.500.000**	100,00

PEMERINTAHAN DESA	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**9.500.000**	**9.500.000**	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	201.000	201.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	222.000	222.000	100,00
	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan komputer	727.000	727.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000	5.850.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000	2.500.000	100,00
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	**15.000.000**	**15.000.000**	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	177.000	177.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	73.000	73..000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000	6.000.000	100,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000	2.500.000	100,00
	Belanja Sosialisasi	6.500.000	6.500.000	100,00
JUMLAH		**2.159.895.165**	**1.961.343.310**	90,80

3. Berdasarkan tabel diatas realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Padakembang pada Tahun 2025 sebesar 90,%. Hal ini telah melampaui target penyerapan anggaran yang telah ditetepkan sebesar 90.80%.

4. Capaian penyerapan anggaran tahun 2025 dapat melampaui target, disebabkan adanya peningkatan kinerja pegawai di Kecamatan Padakembang sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan yang telah disusun.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padakembang merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kecamatan Padakembang dalam Tahun 2025. Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi aparatur Kecamatan Padakembang dalam pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Jumlah karyawan/ SDM yang ada di Kecamatan Padakembang yang hanya 10 (sepuluh) orang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada, meskipun hal ini tidak membuat keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja pelayanan.
2. Keterbatasan sarana prasarana yang ada sehingga dalam survey kepuasaan Masyarakat ada unsur pelayanan yang belum optimal, hal ini berkatan erat dengan kenyamanan dan kepuasan penerima pelayanan publik di kecamatan padakembang.
3. Masih belum optimalnya siitem pelayanan berbasis elektronik di kecamatan padakembang sehingga teknoligi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi Transfaransi dan akuntabilitas pemerintahan kevcamatan padakembang.

Secara keseluruhan dalam pencapaian kinerja, semua indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih banyak keterlambatan, kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Aparatur Kecamatan Padakembang berusaha untuk mencari solusi dan pemecahan masalah tersebut. Adapun Pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan dinas intansi untuk solusi permasalahan keterbatasan SDM ini, dengan mengajukan penambahan SDM.
2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pegawai pelayanan serta mekanisme dan prosedur pelayanan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.
3. Mengoptimalkan SPBE dengan terus berupaya melaksanakan koordinasi dengan intansi terkait dipemerintahan demi kelancaran dan terlaksananya teknoligi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi Transfaransi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan padakembang.
4. Secara intern perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai di unit kerja Kecamatan Padakembang, karena dengan adanya peningkatan pemahaman tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi, diharapkan akan adanya perubahan pola pikir dan pola kerja serta kinerja organisasi dapat meningkat.

Kecamatan Paakembang memiliki 3 sasaran dan 5 indikator, semua sasaran sudah mencapai target dan dari 5 indikator sudah mencapai target dengan klasifikasi sangat tinggi,

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun-tahun mendatang.

Padakembang, Januari 2025
Camat Padakembang

DADAN HAMDANI.SKM, M.Si
NIP.19710129 198912 1 001